



Efektivitas Penggunaan *Letter of Credit* dan *Telegraphic Transfer* dalam Pembayaran Pengadaan Alpalhan Luar Negeri

Andika Bayu Wicaksono^{1*}, Junaidi², Al Anshori³

¹²³ Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 26, 2025

Revised July 14, 2025

Accepted July 16, 2025

Available online July 16, 2025

Kata Kunci :

Letter of Credit, Telegraphic Transfer, TNI AU, Pengadaan

Keywords:

Letter of Credit, Telegraphic Transfer, TNI AU, Pengadaan



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright ©2025 by Andika Bayu Wicaksono, Junaidi, Al Anshori. Published by CV. Rifainstitut

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji efektivitas penggunaan *Letter of Credit* (L/C) dan *Telegraphic Transfer* (TT) dalam pengadaan Alat Peralatan Pertahanan (Alpalhan) oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU). Masalah yang dihadapi termasuk ketergantungan pada pengadaan luar negeri dan fluktuasi nilai tukar yang mempengaruhi anggaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keunggulan dan kelemahan dari kedua metode pembayaran ini berdasarkan regulasi yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/PMK.01/2024. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis SWOT untuk mengevaluasi aspek-aspek terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa L/C menawarkan keamanan dan kontrol kualitas yang lebih baik, meskipun prosesnya rumit. Sebaliknya, TT menawarkan kecepatan tetapi lebih rentan terhadap risiko penipuan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan strategi mitigasi risiko, seperti hedging dan perencanaan anggaran yang cermat, untuk meningkatkan efisiensi pengadaan Alpalhan dan mendukung kesiapan TNI AU. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam penyusunan kebijakan pengadaan pertahanan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika global. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan di lingkungan TNI dan Kementerian Pertahanan dalam menentukan metode pembayaran yang paling optimal dan berkelanjutan ke depan

ABSTRACT

This study examines the effectiveness of using Letters of Credit (L/C) and Telegraphic Transfers (TT) in the procurement of Defense Equipment (Alpalhan) by the Indonesian Air Force (TNI AU). The issues faced include dependence on foreign procurement and exchange rate fluctuations that affect the budget. The aim of this research is to analyze the advantages and disadvantages of both payment methods based on the applicable regulations, namely the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 1/PMK.01/2024. The method used is a qualitative approach with SWOT analysis to evaluate related aspects. The findings indicate that L/C offers better security and quality control, although the process is more complex. On the other hand, TT provides speed but is more vulnerable to fraud risks. The study concludes that risk mitigation strategies, such as hedging and careful budget planning, are necessary to improve the efficiency of Alpalhan procurement and support the readiness of the Indonesian Air Force. These findings make an important contribution to the formulation of defense procurement policies that are adaptive and responsive to global dynamics. Moreover, this research is expected to serve as a reference for policymakers within the military and the Ministry of Defense in determining the most optimal and sustainable payment method going forward.

1. PENDAHULUAN

Dalam upaya berkelanjutan untuk memodernisasi Alat Peralatan Pertahanan (Alpalhan) yang krusial bagi peningkatan kesiapan operasional dan penguatan kedaulatan negara, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) hingga saat ini masih mengandalkan pengadaan Alpalhan dari luar negeri. Strategi ini diambil mengingat kompleksitas teknologi pertahanan

*Corresponding author

E-mail addresses: Andikabayu.wicaksono@gmail.com (Andika Bayu Wicaksono)

yang sering kali memerlukan keahlian dan fasilitas produksi khusus yang belum sepenuhnya tersedia di dalam negeri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/PMK.01/2024, metode pembayaran utama yang digunakan dalam proses pengadaan Alpalhan tersebut adalah Letter of Credit (L/C). L/C dipilih karena menawarkan keamanan pembayaran yang tinggi bagi kedua belah pihak, dengan jaminan bahwa dana akan dicairkan secara transparan dan akuntabel setelah persyaratan yang disepakati bersama terpenuhi secara rinci dan diverifikasi oleh lembaga keuangan independen. Sementara itu, dalam kondisi tertentu, terutama pada situasi darurat atau kebutuhan mendesak, pernah digunakan metode Telegraphic Transfer (TT) yang memberikan kemudahan dan kecepatan dalam transfer dana, terutama dalam situasi yang membutuhkan respons cepat dan fleksibilitas dalam proses transaksi.

Penggunaan L/C sebagai metode pembayaran utama dalam pengadaan Alpalhan luar negeri tidak terlepas dari berbagai tantangan. Fluktuasi nilai tukar mata uang asing, terutama pada akhir tahun anggaran, menjadi isu utama yang dapat berdampak signifikan pada kuantitas Alpalhan yang diperoleh. Penelitian-penelitian terdahulu seperti ([Herlambang, 2023](#); [Kotambunan, 2019](#)) telah menguraikan keunggulan dan kelemahan masing-masing metode pembayaran, menekankan pentingnya jaminan pembayaran yang ditawarkan L/C serta risiko pembayaran yang lebih tinggi pada TT. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik membahas konteks pengadaan Alpalhan dan dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan Alpalhan TNI AU.

Dalam menganalisis efektivitas penggunaan metode pembayaran ini, penelitian menggunakan teori efektivitas yang didefinisikan sebagai kemampuan mencapai hasil yang diinginkan secara optimal, dengan memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya ([Pasieczny & Więckowski, 1987](#)). Dalam studi manajemen dan keuangan internasional, efektivitas juga mencakup dimensi strategis seperti kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal dan regulasi yang berlaku ([Gibson, 2008](#); [Kaplan & Norton, 2004](#); [Morrison & Buhalis, 2024](#)). Hal ini sangat relevan dalam konteks pengadaan Alpalhan yang melibatkan mekanisme pembayaran antarnegara dengan risiko dan regulasi kompleks. Dengan demikian, efektivitas dalam penelitian ini dipahami sebagai sejauh mana metode pembayaran L/C dan TT mampu mencapai tujuan utama pengadaan, yaitu keamanan transaksi, efisiensi waktu, dan kepastian hukum, dengan mempertimbangkan faktor eksternal seperti stabilitas nilai tukar, hubungan diplomatik, dan kebijakan ekspor-impor ([Wang et al., 2014](#)).

Lebih jauh, penelitian ini juga didasari oleh teori perdagangan internasional, khususnya teori keunggulan komparatif oleh ([Ricardo, 1821](#)) yang menyatakan bahwa negara memperoleh manfaat dari perdagangan internasional dengan memfokuskan diri pada produksi barang yang paling efisien. Konteks pengadaan Alpalhan oleh TNI AU relevan dengan teori ini karena mayoritas peralatan pertahanan masih merupakan produk impor, sehingga pengadaan dilakukan melalui transaksi internasional menggunakan mata uang asing. Selain itu, teori ekonomi pertahanan ([M. D. Intrilligator, 1990](#)) turut menjadi landasan penting untuk memahami bagaimana pengeluaran pertahanan, termasuk pengadaan Alpalhan, dialokasikan dalam rangka menjaga stabilitas nasional dan kedaulatan negara.

Penelitian terdahulu seperti ([Harahap, 2018](#)) menunjukkan bahwa L/C efektif dalam meminimalkan risiko gagal bayar melalui sistem dokumentasi yang ketat dan terstandarisasi, sedangkan ([Bernanke, 2020](#); [Kotambunan, 2019](#)) menekankan perlindungan hukum yang kuat pada transaksi perdagangan internasional berdasarkan UCPDC 600. Namun, kedua penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek umum perdagangan internasional dan belum membahas secara spesifik dampak regulasi nasional maupun fluktuasi nilai tukar dalam konteks pengadaan alat pertahanan militer. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis efektivitas penggunaan L/C dan TT dalam pengadaan Alpalhan luar negeri TNI AU, termasuk upaya mitigasi terhadap kendala-kendala yang muncul dalam implementasinya.

Pembahasan ini akan menggunakan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk mengevaluasi efektivitas kedua metode pembayaran secara objektif, dengan mempertimbangkan aspek risiko keuangan, efisiensi operasional, dan kepatuhan terhadap regulasi. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan pemilihan metode pembayaran paling sesuai, serta membantu merumuskan strategi mitigasi risiko yang efektif. Dengan demikian, diharapkan proses pengadaan Alpalhan dapat berjalan lancar dan efisien sehingga kesiapan operasional TNI AU dapat mencapai tingkat maksimal dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan metode pembayaran Letter of Credit (L/C) dan Telegraphic Transfer (TT) dalam pengadaan Alat Peralatan Pertahanan (Alpalhan) oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU). Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan kontekstual terhadap praktik pembayaran dalam pengadaan Alpalhan luar negeri yang bersifat strategis dan bernilai tinggi. Subjek penelitian adalah proses dan mekanisme pembayaran pengadaan Alpalhan dari luar negeri oleh TNI AU, sedangkan objek penelitian berfokus pada efektivitas kedua metode pembayaran tersebut dalam menjamin keamanan transaksi, efisiensi waktu, dan kepastian hukum.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.01/2024, serta telaah terhadap dokumen-dokumen pengadaan dan penelitian terdahulu yang terkait dengan penggunaan L/C dan TT dalam perdagangan internasional. Selain itu, data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pejabat TNI AU dan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses pengadaan untuk mendapatkan informasi empiris mengenai praktik dan kendala yang dihadapi di lapangan.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari masing-masing metode pembayaran. Analisis ini memungkinkan penilaian yang komprehensif terhadap risiko keuangan, efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap regulasi, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemilihan metode pembayaran yang paling efektif dalam mendukung kelancaran pengadaan Alpalhan dan peningkatan kesiapan operasional TNI AU.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN.

Perbandingan efektivitas antara *Letter of Credit (L/C)* dan *Telegraphic Transfer (TT)* sebagai metode pembayaran pengadaan Alpalhan luar negeri TNI AU

Dalam upaya pengadaan Alat Peralatan Pertahanan (Alpalhan) dari luar negeri, TNI AU menggunakan dua metode pembayaran utama, yaitu *Letter of Credit (L/C)* dan *Telegraphic Transfer (TT)*, yang masing-masing memiliki tingkat efektivitas dan risiko yang berbeda. L/C dipilih karena memberikan tingkat keamanan pembayaran yang tinggi bagi kedua belah pihak, dengan jaminan bahwa dana hanya akan dicairkan apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi dan diverifikasi secara rinci oleh lembaga keuangan independen. Kelebihan dari metode ini meliputi transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, jaminan keamanan pembayaran, serta adanya mekanisme verifikasi yang ketat dari pihak bank. Namun demikian, L/C juga memiliki kelemahan, antara lain adanya risiko fluktuasi nilai tukar yang tidak terduga, yang dapat mengganggu pencapaian target modernisasi serta berdampak pada pemenuhan kebutuhan operasional TNI AU.

Sebaliknya, *Telegraphic Transfer* (TT) umumnya digunakan dalam kondisi darurat atau kebutuhan mendesak yang memerlukan proses pembayaran yang cepat dan fleksibel. TT dinilai lebih efektif dalam hal efisiensi proses, karena importir dapat melakukan pembayaran uang muka (*down payment*) yang langsung digunakan untuk memulai produksi, dan pelunasan dilakukan ketika barang siap dikirimkan. Keunggulan lainnya adalah kemudahan dalam pelaksanaan transaksi karena tidak banyak pihak yang terlibat, serta biaya yang lebih rendah dibandingkan L/C, hanya mencakup biaya transfer. Namun demikian, kelemahan dari TT adalah tidak adanya jaminan keamanan seperti pada L/C, karena peran bank dalam TT hanya sebatas perantara transfer dana tanpa kewajiban menjamin dokumen atau pembayaran. Selain itu, pembayaran yang dilakukan dalam beberapa tahap membuka risiko ketidakpastian dalam pengiriman dokumen yang diperlukan.

Berdasarkan faktor pendorong, TT sering kali dipilih atas dasar kepercayaan antara kedua belah pihak, proses yang lebih sederhana, serta waktu pelaksanaan yang lebih cepat. Dokumen yang dibutuhkan juga relatif sedikit dan tidak serumit L/C, mencakup antara lain *commercial invoice*, *packing list*, *shipping instruction*, dan *Certificate of Origin* (COO) atau Surat Keterangan Asal (SKA). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa L/C menawarkan tingkat keamanan dan verifikasi yang tinggi, tetapi menghadapi tantangan dari sisi fleksibilitas dan risiko fluktuasi nilai tukar. Sementara itu, TT lebih murah dan cepat, namun tidak menjamin keamanan transaksi sepenuhnya karena keterlibatan bank hanya sebagai perantara. Oleh karena itu, pemilihan metode pembayaran dalam pengadaan Alpalhan perlu mempertimbangkan situasi operasional, urgensi, serta risiko strategis dan keuangan yang mungkin timbul.

Analisis SWOT

Letter of Credit (L/C)

Tabel 1. Analisis SWOT *Letter Of Credit*

IFAS EFAS	Strengths	Weaknesses
	1. Keamanan pembayaran tinggi 2. Jaminan dana transparan dan akuntabel	1. Fluktuasi kurs tidak terduga 2. Pengaruh pemenuhan kebutuhan operasional TNI AU
Opportunities	Strategi S-O	Strategi W-O
- Diverifikasi oleh lembaga keuangan independen.	- Memanfaatkan lembaga keuangan independen untuk keamanan dan jaminan dana pembayaran	- Melakukan koordinasi dengan lembaga keuangan independen terhadap fluktuasi kurs & pengaruh pemenuhan kebutuhan operasional TNI AU
Threats	Strategi S-T	Strategi W-T

Berpotensi menghambat pencapaian target modernisasi Alutsista TNI AU	Meningkatkan keamanan dan jaminan pembayaran terhadap potensi yang menghambat pencapaian target modernisasi Alutsista TNI AU	1. Mengantisipasi fluktuasi kurs mata uang 2. Mengeliminir pengaruh pemenuhan kebutuhan operasional TNI AU. 3. Mengeliminir hambatan pencapaian target modernisasi
--	--	--

Sumber: Olahan Penulis

Tabel 2. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Pencapaian Tujuan *L/C*

Efektifitas Pembayaran Pengadaan Alpalhan Luar Negeri

FAKTOR INTERNAL (I) & FAKTOR EKSTERNAL (E)							
NO	FAKTOR-FAKTOR (S-W-O-T) YG BERPENGARUH PADA PENCAPAIAN TUJUAN	RESPONDEN					I/ E
		1	2	3	4	5	
1	A Keamanan pembayaran tinggi	I	I	I	I	I	INTERNAL
2	B Jaminan dana transparan	I	I	I	E	I	INTERNAL
3	C Fluktuasi kurs valuta asing tidak terduga	I	I	E	I	I	INTERNAL
4	D Mempengaruhi pemenuhan kebutuhan operasional TNI AU	E	E	E	E	E	EKSTERNAL
5	E Diverifikasi oleh lembaga keuangan independen	E	I	E	E	E	EKSTERNAL
6	F Berpotensi menghambat pencapaian target modernisasi Alutsista TNI AU	E	E	E	E	E	EKSTERNAL
7	G Jaminan dana akuntabel	I	I	I	E	I	INTERNAL

Sumber : Olahan Penulis

Telegraphic Transfer (TT)

Tabel 3. Analisis SWOT *Telegraphic Transfer*

IFAS EFAS	Strengths	Weaknesses
	1. Efektif dalam proses 2. Kemudahan transaksi 3. Efisiensi biaya	1. <i>Advicing bank dan issuing bank</i> hanya sebagai perantara bukan penjamin
Opportunities	Strategi S-O	Strategi W-O
1. Proses pembayaran DP & sisanya akan dibayarkan jika barang sudah siap dikirim. 2. Tidak terlalu banyak pihak yang terlibat	- Melakukan efektifitas dan efisiensi biaya serta kemudahan transaksi pembayaran DP & sisa barang sudah siap dikirim	1. Mengantisipasi risiko pembayaran > 70% barang belum siap dikirimkan. 2. Antisipasi terjadinya kontrak tahun jamak
Threats	Strategi S-T	Strategi W-T

- Risiko pembayaran lebih tinggi	- Melakukan monitoring secara ketat terhadap risikotingginya pembayaran	- Mengantisipasi tidak adanya jaminan keuangan terhadap risiko pembayaran lebih tinggi & revisi kontrak.
----------------------------------	---	--

Sumber : Olahan Penulis

Tabel 2. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Pencapaian Tujuan *TT*

Efektifitas Pembayaran Pengadaan Alpalhan Luar Negeri

FAKTOR INTERNAL (I) & FAKTOR EKSTERNAL (E)						
NO	FAKTOR-FAKTOR (S-W-O-T) YG BERPENGARUH PADA PENCAPAIAN TUJUAN	RESPONDEN				
		1	2	3	4	5
1	A. Efektifitas dalam proses	I	I	I	I	I
2	B. Kemudahan transaksi	I	I	I	I	I
3	C. Efisiensi biaya	I	I	I	I	I
4	D. Advicing bank dan issuing bank hanya sebagai perantara bukan penjamin	I	I	I	I	I
5	E. Proses pembayaran DP & sisanya akan dibayarkan jika barang sudah siap dikirim	E	E	E	E	E
6	F. Tidak terlalu banyak pihak yang terlibat	E	E	E	E	E
7	G. Risiko pembayaran lebih tinggi	E	E	E	E	E

Sumber : Olahan Penulis

Hasil Perbandingan dan Pengaruh Regulasi terhadap Efektivitas Pembayaran

Penggunaan metode pembayaran *Letter of Credit* (L/C) dan *Telegraphic Transfer* (TT) dalam pengadaan Alpalhan luar negeri oleh TNI AU menunjukkan perbedaan signifikan dalam efektivitas waktu dan efisiensi biaya. Secara umum, strategi penggunaan kombinasi L/C dan TT memberikan efisiensi dalam pelaksanaan transaksi, namun masing-masing metode memiliki kelemahan yang perlu dipertimbangkan. Penggunaan TT, meskipun lebih cepat dan hemat biaya, memiliki risiko terhadap pencapaian target modernisasi dan dapat memengaruhi pemenuhan kebutuhan operasional TNI AU jika tidak digunakan secara hati-hati.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/PMK.01/2024 memberikan pengaruh besar terhadap efektivitas metode pembayaran tersebut. Regulasi ini mengatur tata cara pembayaran pengadaan dalam valuta asing yang bersumber dari anggaran Rupiah Murni dan memperkuat posisi L/C sebagai metode utama dengan menyediakan kerangka kerja yang lebih jelas dan terstruktur. Dari sisi keamanan transaksi, PMK ini menegaskan pentingnya verifikasi dokumen dan kepatuhan terhadap regulasi internasional. Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 27 mengatur bahwa pembayaran kepada negara wajib dilakukan melalui mekanisme L/C, disertai kewajiban KPPN untuk memverifikasi ketersediaan pagu anggaran serta keabsahan dokumen. Ini memberikan landasan kuat untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan transparansi.

PMK ini juga memberikan panduan terkait pengelolaan risiko nilai tukar, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa alokasi anggaran dalam DIPA harus mencerminkan nilai ekuivalen dalam valuta asing. Dengan demikian, perencanaan anggaran menjadi lebih akurat, meskipun tetap menuntut kehati-hatian terhadap volatilitas nilai

tukar rupiah. Selain itu, pencabutan PMK sebelumnya (263/PMK.05/2015) melalui Pasal 39 menunjukkan adanya upaya modernisasi sistem pembayaran dengan implementasi *e-submission dan e-verification* yang diharapkan mempercepat proses pembukaan dan pencairan L/C.

Sementara itu, TT diakui oleh PMK ini sebagai alternatif yang dapat digunakan dalam kondisi mendesak, seperti dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a. Namun, penggunaannya tidak diatur secara rinci dalam konteks kedaruratan, sehingga harus dibatasi dan dilandasi justifikasi kuat. Praktikanya, seperti pada pengadaan suku cadang pesawat Hawk A-4 menjelang HUT TNI AU, menunjukkan bahwa TT digunakan ketika waktu menjadi faktor kritis. Meski begitu, Pasal 10, 11, dan 13 mengharuskan adanya verifikasi ketat, termasuk identitas pemasok, keabsahan dokumen, dan jaminan atas pembayaran sebelum barang diterima.

Dampak Fluktuasi Kurs Dolar AS terhadap Efektivitas Pembayaran

Fluktuasi nilai tukar dolar AS memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas kedua metode pembayaran tersebut. Dalam metode L/C, walaupun menawarkan jaminan keamanan yang lebih tinggi, fluktuasi kurs tetap menimbulkan risiko dalam perhitungan biaya pengadaan. Apabila nilai tukar dolar naik secara signifikan, maka nilai pengeluaran dalam rupiah meningkat dan bisa melampaui pagu anggaran. Sebagai contoh, pada pengadaan tahun 2023 untuk pesawat T-50i dan tahun 2024 untuk pesawat G120TP-A Grob, terjadi kekurangan anggaran akibat perbedaan kurs antara saat kontrak dan saat pembayaran, dengan nilai minus mencapai ratusan juta rupiah.

PMK 1/PMK.01/2024 juga mengatur bahwa anggaran rupiah murni harus mempertimbangkan nilai tukar yang berlaku, namun dinamika pasar membuat perencanaan menjadi sulit. TNI AU dituntut untuk menyusun anggaran yang fleksibel dan mampu mengantisipasi perubahan kurs yang tidak menguntungkan. Apabila L/C dibuka ketika nilai tukar rendah, proses birokrasi yang lambat dapat menghilangkan potensi keuntungan tersebut ketika nilai tukar kembali menguat, seperti yang disampaikan oleh salah satu pejabat Diskauu.

Di sisi lain, TT yang cenderung digunakan untuk kondisi mendesak, meskipun cepat, memiliki kerentanan yang tinggi terhadap fluktuasi kurs. Karena pembayaran sering dilakukan tanpa jaminan yang kuat, nilai tukar yang naik dapat menyebabkan pemborosan anggaran jika barang yang diterima tidak sesuai spesifikasi. Tanpa proses verifikasi menyeluruh, risiko penipuan atau ketidaksesuaian barang semakin tinggi. Selain itu, ketidakstabilan kurs menyulitkan penentuan estimasi anggaran yang akurat, memaksa TNI AU untuk menyediakan dana lebih sebagai langkah antisipasi, yang dapat mengganggu efisiensi anggaran keseluruhan.

Strategi Mitigasi Risiko Fluktuasi Nilai Tukar

Untuk mengatasi dampak fluktuasi nilai tukar, terdapat beberapa strategi mitigasi yang dapat diterapkan TNI AU. Pertama, melalui *hedging*, yaitu membeli kontrak *forward* atau opsi mata uang untuk mengunci nilai tukar tertentu pada waktu transaksi yang akan datang, sehingga membantu pengendalian anggaran. Kedua, perencanaan anggaran yang cermat perlu dilakukan dengan menyediakan dana cadangan guna menutupi kemungkinan kenaikan biaya akibat nilai tukar yang tidak stabil. Strategi ini sejalan dengan prinsip efektivitas yang mempertimbangkan keseimbangan antara input dan output secara optimal. Ketiga, pemantauan kurs secara teratur menjadi kunci untuk mendeteksi perubahan signifikan dalam pasar valuta asing dan merespons dengan cepat untuk menjaga kestabilan anggaran dan efisiensi pengadaan.

Dengan memperhatikan seluruh faktor tersebut, pemilihan metode pembayaran dalam pengadaan Alpalhan luar negeri oleh TNI AU harus mempertimbangkan kombinasi antara keamanan transaksi, efisiensi anggaran, urgensi kebutuhan, dan dinamika kurs valuta asing. PMK 1/PMK.01/2024 telah memberikan kerangka hukum dan teknis yang kuat, namun pelaksanaan di lapangan tetap membutuhkan strategi mitigasi dan manajemen risiko yang baik

agar proses pengadaan dapat mendukung kesiapan operasional dan kedaulatan negara secara optimal.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini secara langsung menjawab pertanyaan utama mengenai keunggulan dan kelemahan dari kedua metode pembayaran tersebut dalam konteks pengadaan pertahanan, serta mengidentifikasi sejauh mana faktor-faktor eksternal seperti dinamika kurs dan regulasi fiskal mempengaruhi efektivitas implementasinya. Implikasi praktis dari temuan ini menegaskan pentingnya strategi mitigasi risiko yang terintegrasi, di antaranya penerapan mekanisme *hedging*, perencanaan anggaran yang adaptif terhadap fluktuasi nilai tukar, dan penguatan sistem monitoring serta verifikasi pembayaran yang lebih responsif dan andal.

Secara teoritis, hasil penelitian ini turut memperkaya pemahaman dalam bidang manajemen keuangan pertahanan dengan mengintegrasikan teori efektivitas, ekonomi pertahanan, dan teori perdagangan internasional ke dalam konteks aktual pengadaan militer. Untuk pengembangan ke depan, penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi model hibrida pembayaran luar negeri yang menggabungkan keunggulan dari L/C dan TT, serta melakukan kajian komparatif terhadap metode pembayaran digital terbaru dalam pengadaan pertahanan lintas negara, guna menciptakan sistem pembayaran yang lebih efisien, aman, dan adaptif terhadap perubahan global.

5. REFERENSI

- Bernanke, B. S. (2020). The new tools of monetary policy. *American Economic Review*, 110(4), 943–983.
- Gibson, R. (2008). *Decision Making in Organizations*. Pearson Education.
- Harahap, M. Y. (2018). Letter of Credit sebagai Jaminan Pembayaran Perdagangan Internasional di Indonesia (Tinjauan Tentang Perdagangan Mekanisme Dan Penerapannya). *Islamic Business Law Review*, 1(1), 60–77. <https://doi.org/https://core.ac.uk/display/266978044>
- Herlambang, F. S. (2023). Analisis Perbandingan antara Letter of Credit dan Telegraphic Transfer dalam Transaksi Perdagangan Internasional. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 10(2), 101–114.
- Intrilligator, M. D. (1990). Economics of Military Expenditures. In M. Intrilligator (Ed.), *The Economics of Defense Policy* (hal. 1–27). Routledge.
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2004). *Strategy Maps: Converting Intangible Assets Into Tangible Outcomes* (Vol. 26, Nomor 4). Harvard Business Press. <https://doi.org/10.4324/9781003022022-92>
- Kotambunan, G. B. H. (2019). Kajian Yuridis Penggunaan Letter of Credit dalam Transaksi Perdagangan Internasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 300–315.
- Morrison, A. M., & Buhalis, D. (2024). *Routledge handbook of trends and issues in tourism sustainability, planning and development, management, and technology*. Routledge New York, NY.
- Pasieczny, L., & Więckowski, J. (1987). *Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa*. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
- Ricardo, D. (1821). *On the principles of political economy*. J. Murray London.
- Wang, Q., Craighead, C. W., & Li, J. J. (2014). Justice served: Mitigating damaged trust stemming from supply chain disruptions. *Journal of Operations Management*, 32(6), 374–386.